



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 028 / Kep. 141 - BKAD / 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PENGGUNA, PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA, PENYIMPAN BARANG BENDA BERHARGA, PENYIMPAN BARANG KHUSUS FARMASI SERTA ATASAN LANGSUNG PENGURUS BARANG PENGGUNA, PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA, PENYIMPAN BARANG BENDA BERHARGA, PENYIMPAN BARANG KHUSUS FARMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 perlu ditunjuk Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna, Penyimpan Barang Benda Berharga, Penyimpan Barang Khusus Farmasi Serta Atasan Langsung Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna, Penyimpan Barang Benda Berharga, Penyimpan Barang Khusus Farmasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna, Penyimpan barang benda Berharga, Penyimpan Barang Khusus farmasi serta Atasan Langsung Pengurus Barang pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna, Penyimpan Barang Benda Berharga, Penyimpan Barang Khusus Farmasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.

- KEDUA : Nama-nama Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna, Penyimpan barang benda Berharga, Penyimpan Barang Khusus farmasi serta Atasan Langsung Pengurus Barang pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna, Penyimpan Barang Benda Berharga, Penyimpan Barang Khusus Farmasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pembantu Pengurus Barang Pengguna, Penyimpan Barang benda Berharga dan penyimpanan Barang khusus farmasi mempunyai tugas sebagai berikut ;
- a. menerima, menyimpan dan menyerahkan barang Pemerintah Daerah dalam pengaturannya atas perintah atasan langsung.
 - b. mencatat secara tertib dan teratur penerimaan barang, dan keadaan persediaan barang ke dalam Buku/Kartu Barang menurut jenisnya.
 - c. menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan barang dan pengeluaran penyerahan secara tertib dan teratur.
 - d. membuat laporan mengenai barang yang diurusnya berdasarkan kartu persediaan barang.
 - e. membuat laporan, baik secara periodik maupun secara intensif mengenai pengurusan barang yang menjadi tanggungjawabnya kepada Bupati melalui atasan langsung.
 - f. membuat perhitungan/pertanggung jawaban atas barang yang di urusnya.
 - g. bertanggungjawab kepada Bupati melalui atasan langsungnya mengenai barang yang diurusnya dari kerugian, hilang, rusak atau dicuri atau sebab lainnya.
 - h. melakukan perhitungan barang (*stock of name*) sedikitnya setiap 3 (tiga) bulan sekali, selanjutnya dibuatkan Berita Acara perhitungan Barang yang ditanda tangani oleh Pengurus Barang Pengguna/ Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan atasan langsung yang bersangkutan
- KEEMPAT : Pengurus Barang Pengguna mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengurus pemakaian barang daerah yang berada pada unit kerja masing-masing.
 - b. mengurus dan menentukan pencatatan barang dalam proses pemakaian
 - c. mencatat secara tertib dan teratur setiap barang kedalam Kartu Inventaris Barang, Kartu Inventaris tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset tetap Lainnya, dan Kontruksi Dalam Pengerjaan.

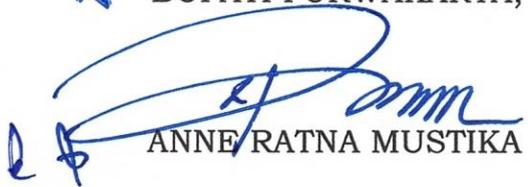
- d. mencatat barang-barang inventaris yang ada pada setiap ruangan pada unit kerja masing-masing.
- e. menyusun daftar rekapitulasi inventaris barang.
- f. menyusun daftar mutasi barang memuat data barang yang berkurang dan atau yang bertambah dalam suatu jangka waktu tertentu (1 Semester dan 1 Tahun).

KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 028/Kep.139-BKAD/2018 Tanggal 5 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna, Penyimpan barang benda Berharga, Penyimpan Barang Khusus farmasi serta Atasan Langsung Pengurus Barang pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna, Penyimpan Barang Benda Berharga, Penyimpan Barang Khusus Farmasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 17 Januari 2019

BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : I KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 028/Kep. 141 - BKAD/2019

TANGGAL : 17 Januari 2019

PERIHAL : PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PENGGUNA, PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA, PENYIMPAN BARANG BENDA BERHARGA, PENYIMPAN BARANG KHUSUS FARMASI
SERTA ATASAN LANGSUNG PENGURUS BARANG PENGGUNA, PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA, PENYIMPAN BARANG BENDA BERHARGA, PENYIMPAN BARANG KHUSUS FARMASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA-NAMA PENGURUS BARANG PENGGUNA, PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA, SERTA ATASAN LANGSUNG
PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	OPD	N A M A		ATASAN LANGSUNG
		PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA	PENGURUS BARANG PENGGUNA	
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah	Hariyadi	Ahmad Suhendi	SEKRETARIS DAERAH
2	Sekretaris DPRD	Ade Abrag Mutachirin	Ahmad Syahrudin	SEKRETARIS DPRD
3	Inspektorat	Tubagus Hidayat	Jaka Saipul Bahri, SE	INSPEKTORAT
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	Dewi Utami, A.Md	Dadan Hindarsah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU ATAP
5	Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana	Oleh Suhendar	Sri Mei Mulyatri	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6	Dinas Lingkungan Hidup	Nandang Supriatna	Dedi Supriatna, S.Sos	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Pengairan	Maripin	Hani Susilawati	DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA, DA PENGAIRAN
8	Dinas Tata Ruang dan Pemukiman	Maksum Sumarga	Ai Mryani Solihat, SH	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	Siti halimah Barkah	Jajang Ruhiat	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
10	Dinas Pendidikan	Gugun Rayagunadi	Heri Setiadi	DINAS PENDIDIKAN
11	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariswisata, dan Kebudayaan		Fuadul Munir	DINAS KEPEMUDAAN, OLARHAGA PARIWISATA, DAN KEBUDAYAAN
0	Dinas Kesehatan	Evi Ariyani, SKM	Budi Santoso, SKM	DINAS KESEHATAN
13	Dinas Pangan dan Pertanian	Ida Nur Amina	Susong Hermawan	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
14	Dinas Perikanan dan Peternakan	Novi Nurbayan	Dadi Suwandi	DINAS PEERIKANAN DAN PETERNAKAN
15	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Ruli Rudianti, SH	Salmanto, SE	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
16	Kecamatan Cibatu		Hasim Yusyadi	KECAMATAN CIBATU
17	Kecamatan Plered		Ahmad Anwar	KECAMATAN PLERED
18	Kecamatan Tegalwaru		Dedy Supriadi	KECAMTAN TEGALWARU
19	Kecamatan Pasawahan		Mamat, SE	KECAMATAN PASAWAHAN
20	Kecamatan Wanayasa		Eman Sulaeman	KECAMATAN WANAYASA
21	Kecamatan Jatiluhur		Jajang Ruhiyatna	KECAMATAN JATILUHUR
22	Kecamatan Sukatani		Endang Sumarna	KECAMATAN SUKATANI

NO	OPD	N A M A		ATASAN LANGSUNG
		PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA	PENGURUS BARANG PENGGUNA	
1	2	3	4	5
23	Dinas Perhubungan	Lilis Tarlina, SE	R. Wawang Ridwan	DINAS PERHUBUNGAN
24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nanang Hidayat	Dani Rohdina	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Entis Sutisna	Mohamad Dedy Hermawan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
26	Dinas Koperasi, UMKM Perdagangan dan Perindustrian		Agus Suseno	DINAS KOPERASI,UMKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
27	Dinas Komunikasi dan Informasi	Hendra Setiawan	Dhian Kartika Handayani	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
28	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tedy Riyadi	H. Juanda, SE	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
29	Dins Kearsipan dan Perpustakaan		Endi Suhendi	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
30	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelltian dan Pengembangan Daerah		Dhadi Maulanawan WS. S.Ag	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia	Dede Hermawan	Moh. Hilman Hardiansyah P	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
32	Badan Pendapatan Daerah	Kabul Santoso	Qudrat Priatna	BADAN PENDAPATAN DAERAH
33	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Misnan	Endang Carsono, SE. MM	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
34	Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik		Hendra Gunawan	KANTOR KESATUAN BANGSA, DANPOLITIK
35	Satuan Polisi Pamomg Praja	Dodi Mulyadi	Dadang Suhara, SE	SATUAN POLISI PAMONG PAJA
36	Kecamatan Purwakarta	wawan Hermawan	Jajat, SE	KECAMATAN PURWAKARTA
37	Kecamatan Bungursari		Sunyardih	KECAMATAN BUNGURSARI
38	Kecamatan Babakancikao	Endang, S. SE	Yusup	KECAMATAN BABAKAN CIKAO
39	Kecamatan Maniis		Euis Kartini Purnama Dewi	KECAMATAN MANIIS
40	Kecamatan Bojong		Yusup	KECAMATAN BOJONG
41	Kecamatan Darangdan	Ita Sasmita	Titin Supriatin	KECAMATAN DARANGDAN
42	Kecamatan Kiarapedes		Asep Mulyono	KECAMATAN KIARAPEDES
43	Kecamatan Sukasari		Dedih heryana	KECAMATAN SUKASARI
44	Kecamatan Pondoksalam		Endang Hermawan	KECAMATAN PONDOKSALAM
45	Kecamatan Campaka		Agus Sulaiman	KECAMATAN CAMPAKA


 BUPATI PURWAKARTA,
 ANNE RATNA MUSTIKA